



EFEKTIVITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ririn Yuliatwati¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Dahly Sukmapryandhika³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Artikel ini berjudul "Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat". Fenomena masalah penelitian, berada pada dimensi Efektivitas BPNT yaitu belum optimalnya program yang dilaksanakan karena masih banyaknya kelompok penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Rumusan masalah penelitian, Faktor-faktor apa saja yang menghambat Efektivitas BPNT. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Efektivitas BPNT Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. Penelitian menggunakan teori dari Makmur dengan dimensi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Metode penelitian menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Karang Taruna dan Masyarakat yang menerima BPNT ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran dan distribusi yang tidak tepat waktu. Tetapi angka kemiskinan di Desa Mekarsari masih mengalami turun naik setiap tahunnya. Selain itu, perubahan nyata dalam tingkat kesejahteraan penerima manfaat bervariasi, tergantung pada faktor sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan dan mekanisme distribusi agar efektivitas BPNT dapat lebih maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Mekarsari.

Kata Kunci : *Efektivitas, Bantuan Pangan Non Tunai, Kemiskinan, Mekarsari, Kebijakan Sosial*

Abstract

This article is titled "The Effectiveness of Non-Cash Food Assistance in Reducing Poverty Rates in Mekarsari Village, Ngamprah District, West Bandung Regency." The phenomenon of the research problem lies in the dimension of the Effectiveness of Non-Cash Food Assistance (BPNT), which has not been optimal due to many beneficiary groups not being targeted appropriately. The research problem formulation is, what factors hinder the Effectiveness of BPNT? The objective of the research is to describe and analyze how effective BPNT is in reducing poverty rates. The study uses a theory

from Makmur with dimensions of Program Understanding, Targeting Accuracy, Timeliness, Achievement of Goals, and Real Change. The research method employs a descriptive approach and qualitative approach. Data collection techniques include literature study and field study (observation, interviews, and documentation). Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informants in this study are the Village Head, the Head of Karang Taruna and the community receiving the BPNT. Research results indicate that there are still obstacles in the accuracy of targets and distribution that are not timely. However, the poverty rate in Mekarsari Village still experiences fluctuations every year. Additionally, the tangible changes in the welfare levels of the beneficiaries vary, depending on the social and economic factors surrounding them. Therefore, it is necessary to optimize policies and distribution mechanisms so that the effectiveness of BPNT can be maximized in reducing poverty rates in Mekarsari Village.

Keywords : *Effectiveness, Non-Cash Food Assistance, Poverty, Mekarsari, Social Policy*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah di Negara manapun, terlebih di Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan seakan menjadi masalah yang mengerikan dan terus merongrong keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Hal ini sudah seharusnya menjadi cerminan bagi Pemerintah untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi permasalahan tersebut.

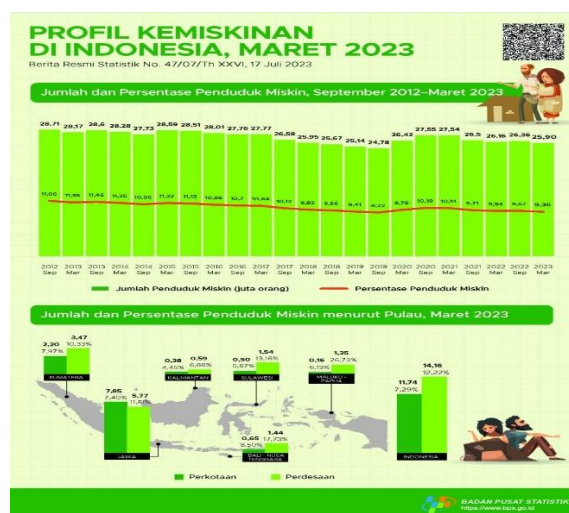
Indonesia pernah memiliki catatan gemilang dalam mengatasi kemiskinan yakni pada era orde baru tahun 1976-1996, dimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada masa itu mengalami penurunan drastis yang awalnya 40% turun menjadi 11% sehingga hal tersebut membuat Indonesia mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Sayangnya pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi kemudian melanda Indonesia, dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut adalah naiknya kembali angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu kemiskinan memerlukan penanganan yang serius dengan melibatkan berbagai pihak dan bidang. Langkah kerjasama, koordinasi, serta kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan mengingat perlunya pengkajian secara mendalam dan komprehensif mencakup seluruh penyebab kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Jika dilihat strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama ini cenderung lebih banyak dilakukan dengan tindakan memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran mereka menjadi berkurang. Seperti halnya peraturan yang dikeluarkan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan pada point pertama yang menyatakan bahwa strategi untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan pemenuhan kebutuhan dasar diantaranya seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan air bersih. Hal tersebut dibuktikan dengan telah banyaknya program kebijakan yang Pemerintah keluarkan dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian. Pada saat terjadi krisis pangan di tahun 1997, Pemerintah memberi perhatian khusus dalam pemenuhan hak pangan masyarakat dengan diadakannya program Operasi Pasar Khusus (OPK).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Maret 2013–Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada bulan September 2020 sampai Maret 2021, jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh adanya pandemi covid-19 pada Maret 2020 (BADAN PUSAT STATISTIK 2020). Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2013 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Grafik 1.1.

Tabel 1.1. Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2013–Maret 2024



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat bahwa Negara Indonesia sudah cukup baik dalam mengatasi kemiskinan, meskipun angka tersebut masih cukup tinggi. Pemerintah terus mengupayakan agar angka kemiskinan semakin menurun dari tahun ke tahun. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ketidakstabilan produksi pangan dan kecenderungan harga bahan pangan yang semakin meningkat berakibat semakin sulitnya akses memperoleh pangan dan meningkatnya inflasi sehingga semakin tergerusnya pendapatan masyarakat miskin yang akhirnya akan menambah jumlah masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan (Amali, 2020).

Dengan begitu untuk mengatasi kemiskinan perlu adanya upaya pendekatan kemanusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan, serta penyediaan jaminan perlindungan sosial. Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”.

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin dan tidak mampu. Serta dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat manusia”.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar di atas, peran dari Pemerintah sangat diperlukan mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Melihat banyaknya tingkat kemiskinan, terutama di pedesaan membuat Pemerintah terus berinovasi, sehingga muncul lah salah satu program yang diimplementasikan untuk mengatasi kemiskinan yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sebelum adanya program Bantuan Pangan Non Tunai, program subsidi Rastra sudah terlebih dahulu terlaksana, namun pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasikan menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bantuan Sosial Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Sistem baru penyaluran Bantuan Pangan ini diatur dalam peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai. Bantuan Sosial Non Tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur dan bahan pokok lainnya sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein. Untuk menyalurkan Bantuan Sosial Non Tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Bantuan Pangan Non Tunai atau yang disebut dengan BPNT adalah sebuah program Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah yang kemudian diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai tentu tidak bias dibandingkan secara langsung karena program

Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan program keberlanjutan dari program Raskin yang sudah lebih dulu berjalan.

Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai ini salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat, secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketepatan sasaran penyaluran Bantuan Sosial serta mendorong keuangan inklusif.

Penyaluran Bantuan Pangan secara non tunai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Dalam realisasinya program Bantuan Pangan Non Tunai Pemerintah melakukan pengoptimalan dengan menggabungkan program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan. Dalam penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Besaran nominal program Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp. 200.000 yang di transfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik dan mendapatkan beras sebanyak 10 kg setiap bulannya yang dapat diambil di Desa atau Kantor Pos oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu Kabupaten yang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai salah satunya yaitu di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dengan memiliki luas wilayah 2,28 km, jumlah sasaran keluarga penerima manfaat tahun 2024 sebanyak 1.304 kepala keluarga dengan jumlah masyarakat sebanyak 12.210 Jiwa dan data jumlah masyarakat miskin sebanyak 6.271 jiwa.

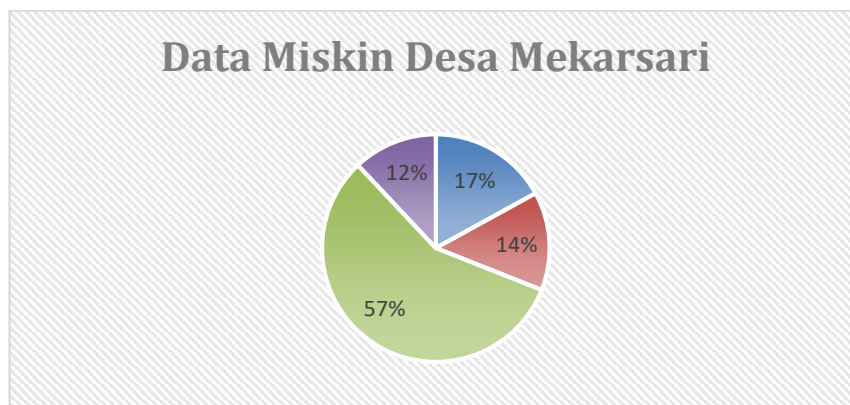
Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

DATA UMUM DESA MEKARSARI TAHUN 2024								
DESA		: MEKARSARI						
KECAMATAN		: NGAMPRAH						
KAB/ KOTA		: KABUPATEN BANDUNG BARAT						
PROVINSI		: JAWA BARAT						
NO	NAMA DUSUN	JUMLAH			JUMLAH JIWA		KET	
		RT	KK	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RW 01		2	86	125	129		
2	RW 07		4	373	616	675		
3	RW 09		5	509	806	820		
4	RW 02		3	416	416	428		
5	RW 03		4	1.045	1.045	995		
6	RW 04		4	662	662	628		
7	RW 05		3	705	705	668		
8	RW 08		2	264	264	370		
9	RW 06		3	496	496	416		
10	RW 10		4	545	545	568		
11	RW 11		4	448	448	385		
JUMLAH			38	5.549	6.128	6.082		12.210 Jiwa

Sumber : Data Desa Mekarsari Tahun 2024

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Mekarsari secara keseluruhan berjumlah 12.210 penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.549, yang tersebar di 11 rw dan 36 rt. Dari jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa Mekarsari terdapat sebagian dari mereka yang termasuk kedalam kategori tidak mampu atau miskin dan terdaftar sebagai penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut data jumlah Kepala Keluarga tidak mampu atau miskin dan data jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2024.

Gambar 1.1. Grafik Persentase Data Miskin Desa Mekarsari Tahun 2021-2024



TAHUN	JUMLAH
2021	1.873 KK
2022	1.506 KK
2023	1.282 KK
2024	1.931 KK

Sumber : Data Masyarakat miskin di Desa Mekarsari Tahun 2021-2024

Dari data persentase diatas, dapat dilihat tahun 2021 jumlah masyarakat miskin di Desa Mekarsari sebanyak 1.873 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 12.210 Jiwa dan untuk Bantuan Pangan Non Tunai sendiri mencapai 966 Kepala Keluarga yang mendapatkannya. Sedangkan di tahun 2022 jumlah masyarakat miskin di Desa Mekarsari sebanyak 1.506 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 12.210 Jiwa dan untuk Bantuan Pangan Non Tunai sendiri mencapai 1.296 Kepala Keluarga yang mendapatkannya. Selanjutnya di tahun 2023 jumlah masyarakat miskin di Desa Mekarsari sebanyak 1.282 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 12.210 Jiwa dan untuk Bantuan Pangan Non Tunai sendiri mencapai 593 Kepala Keluarga yang mendapatkannya. Dan di tahun 2024 jumlah masyarakat miskin di Desa Mekarsari sebanyak 1.931 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 12.210 Jiwa dan untuk Bantuan Pangan Non Tunai sendiri mencapai 1.304 Kepala Keluarga yang mendapatkannya.

Dari data persentase masyarakat miskin di Desa Mekarsari dari tahun 2021 sampai tahun 2024, dilihat dari data tersebut persentasenya naik turun dari tahun ke tahun. Dengan begitu Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Desa Mekarsari. Sehingga dengan adanya program Pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan kebutuhan hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai tidak bisa dilihat secara keseluruhan hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan

oleh Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pelaksanaan program yang efektif dapat dilihat dari penerapan selama ini yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Kantor Desa, terutama berkaitan dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai karena dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, yaitu dilihat dari bagaimana masyarakat dapat memahami kegiatan program itu, apakah suatu program tepat sasaran bagi masyarakat, waktu dan pelaksanaan program yang telah diatur serta pencapaian tujuan yang berorientasi pada perubahan yang nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui indikator efektivitas. Berhasil atau tidaknya program Pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuannya dapat tercapai. Berdasarkan uraian permasalahan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya indikator efektivitas agar program ini berjalan optimal dan indikator keberhasilan tujuan dapat dicapai.

Berdasarkan penelitian awal dilakukan, peneliti menemukan fenomena yang ada dilapangan menunjukkan bahwa program tersebut belum berjalan dengan baik yaitu, angka kemiskinan di Desa Mekarsari naik turun setiap tahunnya, walaupun berbagai macam program sudah dijalankan salah satunya program Bantuan Pangan Non Tunai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi tentang program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini tentunya diperlukan suatu metode penelitian yang dapat membantu dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan permasalahan

yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013: 1) yang mengemukakan bahwa: Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu secara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, nilai, serta fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dan kondisi alamiah. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi serta dokumen resmi lain yang mendukung dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dan teori yang digunakan dengan metode deskriptif. Dengan hal tersebut, maka disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

- 1) Pemahaman Program, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah memahami mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak terkait, walaupun tidak semua warga menghadiri sosialisasi tersebut dan masih ada sebagian kecil yang kurang memahami prosedur teknis dalam pencairan Bantuan Pangan Non Tunai ini.
- 2) Tepat Sasaran, penerima Bantuan Pangan Non Tunai belum dilakukan dengan maksimal hal tersebut dikarenakan masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya, kemudian masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini. Sehingga program Bantuan Pangan Non Tunai masih belum berhasil dalam menentukan sasaran penerima yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang bukan termasuk dalam kelompok Desil2 dalam Basis Data Terpadu (BDT) di daerah

pelaksana sesuai dengan syarat peserta program Bantuan Pangan Non Tunai yang termasuk dalam kategori sosial ekonomi sangat cukup.

- 3) Ketepatan Waktu, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai acapkali mengalami keterlambatan dalam waktu penyaluran bantuan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan waktu penyaluran bantuan sehingga banyak Keluarga Penerima Manfaat yang mengeluhkan mengenai keterlambatan pencairan dana bantuan hingga akhir bulan yang membuat Keluarga Penerima Manfaat harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu.
- 4) Tercapainya Tujuan, Program Bantuan Pangan Non Tunai hadir sebagai bentuk bantuan sosial Pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Di Desa Mekarsari khususnya dalam mencapai tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai ini bisa dikatakan sudah cukup efektif bagi penerima bantuan. Walaupun dari segi penurunan angka kemiskinan di Desa Mekarsari masih naik turun setiap tahunnya dan jumlah dana yang diterima masih kurang menurut beberapa Keluarga Penerima Manfaat serta alokasi waktu dan sasaran penerima.
- 5) Perubahan Nyata, program Bantuan Pangan Non Tunai sudah dapat dikatakan memberikan perubahan yang nyata yang mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan serta keluarga yang mampu meningkatkan gizi makanan sehari-hari didukung dengan kualitas bantuan pangan yang semakin baik, walaupun harapan dari Pemerintah setempat berharap jumlah penerima bantuan sosial berkurang tetapi kenyataannya angka kemiskinan di Desa Mekarsari masih turun naik setiap tahunnya meskipun berbagai program sudah dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, program cukup berjalan dengan baik, dapat dilihat dari setiap dimensi teori efektivitas menurut

Makmur, diantaranya : Pemahaman Program, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah memahami mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak terkait, walaupun tidak semua warga menghadiri sosialisasi tersebut dan masih ada sebagian kecil yang kurang memahami prosedur teknis dalam pencairan Bantuan Pangan Non Tunai ini. Tepat Sasaran, penerima Bantuan Pangan Non Tunai belum dilakukan dengan maksimal hal tersebut dikarenakan masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya, kemudian masyarakat masih ada yang mengeluhkan terkait ketepatan sasaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini. Sehingga program Bantuan Pangan Non Tunai masih belum berhasil dalam menentukan sasaran penerima yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang bukan termasuk dalam kelompok Desil2 dalam Basis Data Terpadu (BDT) di daerah pelaksana sesuai dengan syarat peserta program Bantuan Pangan Non Tunai yang termasuk dalam kategori sosial ekonomi sangat cukup. Ketepatan Waktu, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai acapkali mengalami keterlambatan dalam waktu penyaluran bantuan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan waktu penyaluran bantuan sehingga banyak Keluarga Penerima Manfaat yang mengeluhkan mengenai keterlambatan pencairan dana bantuan hingga akhir bulan yang membuat Keluarga Penerima Manfaat harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Tercapainya Tujuan, Program Bantuan Pangan Non Tunai hadir sebagai bentuk bantuan sosial Pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Di Desa Mekarsari khususnya dalam mencapai tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai ini bisa dikatakan sudah cukup efektif bagi penerima bantuan. Walaupun dari segi penurunan angka kemiskinan di Desa Mekarsari masih naik turun setiap tahunnya dan jumlah dana yang diterima masih kurang menurut beberapa Keluarga Penerima Manfaat serta alokasi waktu dan sasaran penerima. Perubahan Nyata, program Bantuan Pangan Non Tunai sudah dapat dikatakan memberikan perubahan yang nyata yang mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan serta keluarga yang mampu meningkatkan gizi makanan sehari-hari didukung dengan kualitas bantuan pangan yang semakin baik, walaupun harapan dari Pemerintah setempat berharap jumlah penerima bantuan sosial berkurang tetapi kenyataannya angka kemiskinan di Desa Mekarsari masih turun naik setiap tahunnya meskipun berbagai program sudah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dr. Rahyunir Rauf, M. S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa .
- Kartasasmita, G. (1997). *Kemiskinan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mardianto, Tiara. Rohana. (2019). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.

- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan Desa: Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Yogyakarta.
- Sosial, K. (2019). *Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Steers, Richard. M. (2006). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Steers, Richard. M. (2015). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Othenk. (2008). *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivita*. Bandung: Alfabeta.
- widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Eko Dwi, W. (2022). Profil Rumah Tangga Miskin Pada Masyarakat Pedesaan di Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, Malang.
- Harahap, R. (2022). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45-59.
- Hartawan. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5 (1), 59-68.
- Muthia Imelda, N. A. (2022). Analisis Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Penerima Manfaat di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Volume 5 Nomor 1.
- Suci Laurencia, R. Y. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *journal of civic Education*.